

BAB V

SIMPULAN DAN IMPLIKASI

A. Simpulan

Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk menggali dan menganalisis pelaksanaan pinjaman formal dan informal, permasalahan-permasalahan yang melekat di dalamnya, dampak yang ditimbulkannya serta faktor-faktor SWOT yang dapat digunakan untuk menemukan strategi mengalihkan pinjaman informal menuju formal. Strategi ini nantinya akan digunakan untuk merumuskan skema pinjaman yang tepat dalam upaya peningkatan kesejahteraan nelayan kecil terutama nelayan buruh.

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan oleh peneliti, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan sistem pinjaman informal

- a. Pinjaman informal banyak digunakan baik oleh nelayan buruh maupun nelayan juragan. Nelayan juragan tidak menggunakan pinjaman juragan apabila TPI di wilayahnya beroperasi dengan optimal.
- b. Nelayan juragan menggunakan sumber informal yang berasal dari keluarga/kerabat dan pengepul ikan/bakul. Pinjaman ke bakul paling sering diandalkan oleh nelayan juragan. Berbeda dengan nelayan buruh yang hanya mengandalkan kerabat/keluarga, pemilik kapal (juragan) dan bank keliling harian. Pinjaman kepada juragan paling sering digunakan.
- c. Kebutuhan pinjaman informal terdiri dari kebutuhan konsumtif yang sering dilakukan oleh nelayan buruh dan sebagian juragan saat musim paceklik. Sedangkan, nelayan juragan lebih banyak menggunakannya untuk kebutuhan produktif.
- d. Besar pinjaman informal yang digunakan oleh nelayan buruh kurang dari Rp 2.000.000,00. Sedangkan, nelayan juragan umumnya

melakukan pinjaman dari Rp 2.000.000,00 sampai dengan lebih dari Rp 50.000.000,00.

- e. Pinjaman informal lebih mudah dilakukan karena langsung berhadapan dengan pemberi dana langsung. Oleh karena itu, prosesnya sangat mudah dan keputusan pemberian pinjamannya juga cepat diperoleh.
- f. Dampak pinjaman informal bagi nelayan juragan adalah seperti nominal pinjaman yang tiba-tiba berubah, perbedaan harga dan harga jual yang stagnan (tidak pernah naik). Sedangkan, nelayan buruh dikarenakan mempunyai keterikatan melaut dengan juragan, juga mendapatkan efek domino yang ditimbulkan atas pinjaman nelayan juragan ke bakul. Efek domino yang dialami oleh nelayan buruh antara lain: perbedaan harga dan harga yang stagnan; permainan harga antara bakul dan juragan; dan ketetapan harga sepihak.
- g. Hal yang menjadi alasan mengapa nelayan lebih memilih pinjaman informal daripada pinjaman formal antara lain: tanpa persyaratan, tanpa bunga, tidak ada jangka waktu pinjaman, proses pinjaman mudah dan cepat cair, pinjaman yang fleksibel, dan pinjaman terkadang diberikan secara cuma-cuma. Adapun pinjaman yang fleksibel tersebut seperti: dapat *top up* pinjaman, pinjaman selalu dipenuhi, dapat pinjam sewaktu-waktu, tidak ada komisi,

2. Pelaksanaan sistem pinjaman formal

- a. Pinjaman formal pada nelayan terdiri dari pinjaman formal perbankan dan non perbankan. Dalam hal ini, pinjaman non-perbankan yang diselenggarakan oleh koperasi nelayan antara lain: pinjaman operasional (pinjaman juragan) dan pinjaman umum (pinjaman dari LKM DYMS dan Swamitra).
- b. Pinjaman formal lebih banyak diakses oleh nelayan juragan. Hal ini ditunjukkan dengan lebih dari delapan puluh persen partisipan mampu mengakses pinjaman formal. Sedangkan, hanya terdapat satu dari beberapa partisipan nelayan buruh yang dapat mengakses pinjaman formal.

- c. Sumber pinjaman formal yang diakses para partisipan antara lain: KUD MS, LKM DYMS, Swamitra, BPR dan Bank Umum. Adapun KUD MS melalui programnya yaitu pinjaman operasional juragan (PJ) paling banyak diakses.
- d. Pinjaman formal juga paling banyak digunakan untuk kebutuhan produktif oleh nelayan juragan. Adapun kebutuhan-kebutuhan tersebut antara lain: modal, perbaikan alat tangkap dan tambahan alat tangkap.
- e. Pengajuan pinjaman formal umumnya menemui kendala-kendala. Kendala-kendala ini dapat membuat peminjam jera dan memilih mengganti sumber pinjaman atau bahkan menjadikan pilihan terakhir. Adapun kendala-kendala tersebut antara lain administrasi yang terlalu rinci, tidak dimilikinya agunan, proses pencairan lama, tidak terpenuhinya persyaratan, kurangnya akses informasi akibat sosialisasi yang kurang, dan permasalahan internal penyedia pinjaman (kebijakan proses pinjaman, program pinjaman yang belum tersedia, permodalan yang masih terbatas)

3. Mengalihkan Pinjaman Informal melalui Analisis SWOT

a. Kekuatan (*strengths*)

1. KUD MS mempunyai omset yang cenderung meningkat setiap tahunnya.
2. KUD MS memperoleh modal produktif dari LPMUKP untuk dipinjamkan kepada nelayan melalui LKM DYMS dengan bunga rendah.
3. KUD MS memperoleh tambahan plafon dana pinjaman dari LPMUKP.

b. Kelemahan (*weaknesses*)

1. Pinjaman formal masih belum dapat diakses nelayan buruh, terutama yang diselenggarakan oleh koperasi nelayan
2. TPI belum beraktivitas secara optimal.
3. Proses pencatatan administrasi dan keuangan masih banyak dilakukan secara manual.

4. Minimnya sosialisasi terkait dengan pinjaman formal yang diselenggarakan.
5. Kebijakan KUD yang tidak konsisten.
6. Produk pinjaman formal yang diselenggarakan oleh koperasi terbatas pada pihak tertentu.

c. Kesempatan (*opportunities*)

1. KUD MS ditunjuk sebagai role model korporasi petani nelayan di Indonesia.
2. Pemerintah sedang gencar mengeluarkan program peningkatan kualitas hidup untuk keluarga nelayan.
3. Kemungkinan adanya program pinjaman formal baru dengan bunga nol persen.

d. Ancaman (*threats*).

1. Belum dapat diatasinya pinjaman ke bakul dan permasalahan yang ditimbulkan
2. Kecurangan bakul.
3. Bakul menggantikan peran TPI dan Koperasi

B. Implikasi

Berdasarkan kesimpulan yang telah dijelaskan diatas, implikasi yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Hampir semua nelayan juragan masih menggantungkan permodalan pada bakul, sehingga hal ini berakibat pada koperasi nelayan dan unit-unit usaha di dalamnya. Oleh karena itu, perlu dicarikan solusi untuk mengurangi bahkan mengalihkan kecenderungan pinjaman ke bakul, bukan hanya untuk mengembalikan arus kas, tetapi juga untuk memastikan peran koperasi dan unit-usahanya untuk memaksimalkan produktivitas nelayan.
2. Perlu adanya penegakan aturan pada operasional koperasi dan unit-unit didalamnya. Pinjaman kepada bakul mengacaukan fungsi dan aktivitas operasional koperasi dan unit-unit usaha didalamnya. Pinjaman juragan yang macet, iuran anggota yang tidak sesuai dengan aturan yang

ditentukan, TPI yang lumpuh, dan peran koperasi dan TPI yang berubah dilaksanakan oleh bakul.

3. Perlu adanya evaluasi unit-unit usaha pada KUD MS. KUD MS memiliki banyak usaha. Beberapa dari usahanya tidak membuahkan hasil yang maksimal. Adapun permodalan yang tersedia lebih baik difokuskan untuk mengatasi ketergantungan pinjaman nelayan juragan kepada bakul, menyediakan akses permodalan untuk nelayan buruh dan membuka unit usaha yang orientasinya memberdayakan dan meningkatkan penghasilan nelayan.
4. Perlu adanya kerjasama dengan pihak luar, baik dalam negeri maupun luar negeri terkait pemasaran ikan. KUD harus mampu menciptakan pasar agar dapat meningkatkan daya tawar harga jual hasil tangkap nelayan yang buruk akibat adanya pinjaman bakul.
5. Perlu adanya jalinan kerjasama dengan badan/lembaga/industri yang mempunyai program *Corporate Social Responsibility (CSR)*, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) atau Badan Wakaf untuk memaksimalkan potensi nelayan dan upaya peningkatan kualitas hidup serta kesejahteraan keluarga nelayan.
6. Perlu adanya transparansi untuk meningkatkan kepercayaan nelayan terhadap dana titipan iuran anggota yang dikelola oleh koperasi.
7. Perlu adanya sosialisasi terkait dengan pinjaman formal yang diadakan secara menyeluruh. Adapun keberadaan koperasi harus memastikan dan mengevaluasi bahwa semua anggotanya mempunyai hak yang sama terkait informasi pinjaman formal yang disediakan. Hal ini mengingat sosialisasi yang sudah dilaksanakan terbatas pada pihak-pihak yang menerima undangan, sedangkan sosialisasi pada tiap-tiap kelompok yang sudah diberikan terbatas hanya pada pihak tertentu seperti nelayan juragan. Oleh karena itu, diperlukan sosialisasi atas pinjaman formal seperti yang disampaikan oleh pengurus LKM DYMS bahwa pinjaman formal ditujukan untuk semua kalangan yang menjalankan aktivitas perikanan dan berkaitan dengan kehidupan nelayan.

C. Keterbatasan Penelitian

Batasan penelitian yang dihadapi dalam melaksanakan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Pengambilan data dilakukan kepada nelayan di semua kelompok dan pengurus dengan berbagai kondisi misalnya ditengah kesibukan mereka menunggu proses lelang di TPI, pada saat mereka sedang memperbaiki alat tangkap, pada saat mereka sedang menunggu kapal pulang melaut, pada saat mereka sedang berkumpul acara kelompok nelayan dan lain sebagainya. Penelitian selanjutnya apabila ingin mendapatkan informasi secara mendalam dan menyeluruh dapat juga dilakukan dengan metode *Focus Group Discussion* (FGD).
2. Penelitian ini menganalisis sistem pinjaman nelayan. Adapun kategori nelayan hanya berfokus pada nelayan perairan tangkap. Bagi penelitian selanjutnya, dapat menggali dan menganalisis informasi sistem pinjaman nelayan bidang perikanan lainnya seperti perikanan budidaya atau melaksanakan penelitian yang serupa di wilayah yang berbeda. Hal tersebut dikarenakan adanya perbedaan letak geografis seperti laut selatan dan utara pulau jawa dengan di luar pulau jawa, hasil tangkapan asli wilayah tersebut, kondisi infrastruktur, dan keberadaan organisasi nelayan seperti koperasi nelayan dan lain sebagainya merupakan hal-hal yang dapat mempengaruhi perbedaan budaya dan aktivitas kehidupan nelayan perikanan tangkap.
3. Pengambilan data terkait pinjaman formal terbatas pada pinjaman formal yang disediakan oleh koperasi nelayan, sedangkan pinjaman formal terkait dengan KUR Nelayan yang disediakan oleh perbankan belum dilakukan pengambilan data secara langsung. Oleh karena itu, peneliti selanjutnya dapat menggali informasi terkait dengan pinjaman formal secara langsung ke perbankan-perbankan yang menyediakan pinjaman formal seperti KUR Nelayan.
4. Penelitian ini membahas terkait dengan pinjaman formal yang disediakan oleh KUD MS sebagai koperasi nelayan. Aktivitas yang ada di TPI sangat

berhubungan erat dengan proses pinjaman. Oleh karena itu, peneliti selanjutnya dapat melaksanakan penelitian terkait dengan analisis transparansi dan akuntabilitas aktivitas pengelolaan keuangan di KUD MS atau koperasi nelayan lainnya. Hal ini digunakan untuk melihat potensi penyediaan pinjaman formal dan pengembangan aktivitas produktif untuk semua lapisan anggota nelayan koperasi tersebut.

5. Penelitian ini membahas terkait dengan pinjaman formal dan informal serta analisis SWOT dari pembiayaan tersebut. Oleh karena itu, peneliti selanjutnya dapat mengembangkan solusi berupa skema pinjaman yang dapat diterapkan dan mengakomodir kebutuhan segala jenis nelayan seperti nelayan buruh, nelayan juragan, para istri nelayan dan sebagainya. Dalam hal ini peneliti selanjutnya juga dapat menggali potensi dari BAZNAS dan CSR sebagai alternatif aliran pendanaan untuk pinjaman formal nelayan. Hal ini didasarkan atas kondisi banyaknya nelayan buruh yang masih sangat sulit untuk mendapatkan akses pinjaman formal baik dari koperasi maupun perbankan.

